

PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN
TANTE RIAJA KABUPATEN BARRU



OLEH
SADLI
45 96 021 039

*Sebagai salah satu syarat
untuk menempuh ujian akhir
Jurusan ilmu administrasi*

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
2001

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : PERANAN BADAN PERWAKILAN DESA DALAM
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN
BARRU


NAMA MAHASISWA : S A D I I
NO. STAMBUK : 4596021039
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA


TELAH MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI SEBAGAI PERSYARATAN YANG TELAH
DITENTUKAN.

MENYERUJUK

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


(DRS. H. BAHARUDDIN, MSi)


(UDDEN B. SORE, S.IP)

MENGETAHUI,

DEKAN FISIPOL
UNIVERSITAS "45"

KETUA JURUSAN
ILMU ADMINISTRASI
FISIPOL UNIVERSITAS "45"


(DRS. H. HUSAIN HAMKA, MSi)


(DRS. MARTEN D. PALOBO)

HALAMAN PENERIMAAN

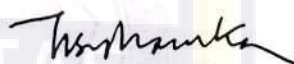
Pada hari Sabtu Tanggal 19 bulan Januari 2002, skripsi dengan judul PERANAN DESA DALAM IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BARRU.

Nama : SADI
No. STB : 4596021039
Jurusan : Administrasi Negara


Telah di terima oleh panitia ujian skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Negara pada jurusan Administrasi Negara program Ilmu Administrasi Negara.

Pengawas Umum,


W. H. Darwis Penguriseng, MSc
Rektor Universitas "45"


Drs. H. Husain Hamka, MSi
Dekan Fisip "45"

Panitia Ujian,


Dra. Hj. Nurmi Nonci, MSi
Ketua


Drs. Marten D. Palobo
Sekretaris

Tim Penguji,

1. Dra. Hj. Nurmi Nonci, MSi

2. Drs. Syamsuddin M

3. Drs. H. Baharuddin, MSi

4. Drs. M. Natsir Tompo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar Sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak semudah perkiraan sebelumnya, sehingga berbagai ragam kesulitan yang penulis temui dan hadapi.

Penulis menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini telah mendapatkan banyak bantuan yang di berikan dari berbagai pihak baik material maupun spiritual, maka wajarlah pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Drs.Syamsuddin M, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Drs.Marten D.Palobo, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara pada Fisipol Universitas "45" Makassar.
3. Bapak Drs.H.Baharuddin,MSI, selaku pembimbing I dan Bapak Uddin B.Sore,SIP pembimbing II, yang senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan mulai dari penyusunan sampai pada tahap perampungan skripsi ini.
4. Bapak Ir.Darwis Panguriseng,MSI, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.

5. Bapak\Ibu Dosen beserta staff pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Makassar, yang selama ini memberikan petunjuk dan nasehat serta ilmu pengetahuannya, dalam masa perkuliahan atau studi penulis.
6. Kepada seluruh teman-teman yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan selama penulis mengikuti perkuliahan sampai kepada penulisan skripsi ini.
7. Bapak Pimpinan Daerah Barru beserta jajarannya, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dan telah memberikan data dan informasi kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini.
8. Kepada adik serta keluarga yang telah banyak mengorbankan waktu dan pikirannya dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT dapat membahis budi baik yang Bapak\Ibu\Saudara-saudari berikan kepada penulis dengan berlipat ganda dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis, keluarga para pembaca dan masyarakat.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa baik dari semua pihak dalam rangka penulis skripsi ini hingga selesainya, penulis doakan semoga mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, Amin.

Makassar, Januari 2002

S A D L I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Metodologi Penelitian.....	5
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Pengertian Pembangunan Desa.....	12
B. Azas dan Tujuan Pembangunan Desa.....	15
C. Peranan dan Fungsi BPD.....	18
D. Pengertian Otonomi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan ...	20
E. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan.....	22
F. Strategi Pengembangan Partisipasi.....	26

BAB III	GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	30
	A. Keadaan Geografisa	30
	B. Keadaan Demografis	32
	C. Keadaan Perekonomian.....	33
	D. Keadaan Sosial Budaya	35
	E. Struktur Organisasi Kecamatan Tanete Riaja	39
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Peranan BPD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan.....	41
	B. Pengaruh Partisipasi Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru	52
	C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Peranan BPD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.....	57
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran-Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
Tabel 1	Pembagian Luas Wilayah Kecamatan Tanete Riaja	31
Tabel 2	Luas Wilayah Kecamatan Tanete Riaja Menurut Kegunaan Tanah.....	32
Tabel 3	Jumlah Penduduk Kecamatan Tanete Riaja.....	32
Tabel 4	Destribusi Penduduk Kecamatan Tanete Riaja.....	33
Tabel 5	Keadaan Penduduk Kecamatan Tyanete Riaja Menurut Mata Pencaharian	34
Tabel 6	Keadaan Penduduk Kecamatan Tanete Riaja Menurut Tingkat Pendidikan.....	36
Tabel 7	Jumlah Sarana Pendidikan Di Kecamatan Tanete Riaja	36
Tabel 8	Jumlah Sarana Kesehatan Di Kecamatan Tanete Riaja	37
Tabel 9	Komposisi Penduduk Kecamatan Tanete Riaja Menurut Agama.	38
Tabel 10	Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Tanete Riaja	39
Tabel 11	Daftar Pegawai Kantor Kecamatan Tanete Riaja.....	39
Tabel 12	Kelompok Jabatan Fungsional	40
Tabel 13	Keaktifan Anggota BPD Menerima/Menampung Aspirasi Masyarakat	45

Tabel 14	Keaktifan Anggota BPD Memotivasi Anggota Masyarakat Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan	46
Tabel 15	Keaktifan Anggota BPD Membantu Pemerintah Memecahkan Masalah Pembangunan	47
Tabel 16	Keaktifan Anggota BPD Mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa	49
Tabel 17	Keaktifan Anggota BPD Membantu Kepala Desa Menyusun Program Kerja	50
Tabel 18	Keaktifan Anggota BPD Melaksanakan Program Kerja Pembangunan	51
Tabel 19	Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	54
Tabel 20	Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Antara Pengurus BPD Dengan Aparat Desa/Kecamatan.....	59
Tabel 21	Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan Administrasi BPD Pembangunan	60
Tabel 22	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pembangunan	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional sekarang ini, pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan masih hidup dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan.

Dengan dasar inilah, maka kegiatan pembangunan desa merupakan sasaran pokok dari Pembangunan Nasional dalam rangka usaha mewujudkan trilogy pembangunan bangsa, yaitu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Sehubungan dengan itu, maka dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1998 – 2003 telah digariskan bahwa :

Pembangunan desa yang mengutamakan pembangunan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan keterpaduan pembangunan wilayah, khususnya antar kawasan dan antar perkotaan dan pedesaan dan keterpaduan pembangunan sektoral, peningkatan investasi perkotaan, pengembangan sumber daya manusia pedesaan, pembangunan kelembagaan dan penguasaan teknologi serta pembangunan pemanfaatan sumber daya alam, dan peningkatan iklim yang mempercepat proses transformasi social ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan. Kemampuan masyarakat pedesaan dalam memproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan, perluasan serta diversifikasi usaha pedesaan guna meningkatkan kapasitas, kemampuan,

pendapatan dan taraf hidup masyarakat pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana perekonomian. Termasuk koperasi dan lembaga keuangan, terus ditingkatkan agar mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan dalam pembangunan.

Relevansinya dengan penggarisan di atas, maka berbagai penekanan yang ditegaskan tersebut nampak yang paling prinsipil dalam usaha pembangunan pedesaan adalah penekanan dalam hal pengembangan dan penataan kelembagaan. Salah satu kelembagaan di pedesaan yang paling berperan penting dalam usaha pembangunan pedesaan adalah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat local yang secara geografis berdiri sendiri serta merupakan wadah atau lembaga yang mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan desa.

Kehadiran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pengelolaan pembangunan pedesaan memberikan kontribusi yang positif dalam upaya mendeklarasikan pembangunan desa. Di samping itu, dengan keberadaannya diharapkan mampu menjadi wadah penggerak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi, baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan, maupun dalam hal pemeliharannya.

Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya, bahwa keberadaan lembaga ini mendapatkan tantangan-tantangan, baik tantangan yang sifatnya ketidakmampuan dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsinya atau katakanlah fungsi-fungsi yang diembangnya tidak dapat

berjalan dengan baik karena adanya faktor-faktor penghambat, misalnya bantuan dana yang tidak cukup, maupun karena tantangan-tantangan yang sifatnya kurang mendukungnya masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan BPD.

Dengan melihat kenyataan-kenyataan dan permasalahan yang ada, di mana kendala dan tantangan masih sering ditemui dan perlu adanya upaya pemecahan, maka menjadi alasan dan stimulan bagi penulis untuk lebih jauh mencoba membahas melalui pendekatan analisis tentang peranan BPD dalam pembangunan desa, dengan mengangkat dan memilih judul :”Peranan BPD Dalam Implementasi Pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru”.

B. Rumusan Masalah

Berbicara mengenai peranan BPD, tentulah mencakup berbagai aspek yang melengkapinya dengan kompleksitas permasalahannya. Kompleksnya suatu permasalahan sangatlah sulit untuk dibahas dalam suatu kesempatan yang bersamaan. Oleh karena melihat fungsi BPD itu sendiri, maka sekaligus BPD juga mempunyai 4 peranan utama yang harus diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Melihat 4 peranan utama BPD tersebut yang cakupan permasalahannya cukup luas dan rumit, maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu hanya 1 fungsi yakni peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.

Jadi guna menghindari terjadinya pembahasan pokok kajian yang mengembang dalam penelitian dan penulisan skripsi nantinya, maka dirasa perlu untuk menetapkan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam praktek ?
2. Bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?
3. Apa yan menjadi factor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam rangka penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam praktek.
2. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat peranan BPD dalam implementasi pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi penentu kebijaksanaan dalam melihat peranan BPD dalam implementasi pembangunan desa.
2. Untuk mengembangkan daya pikir penulis secara obyektif, rasional dan ilmiah tentang aspek-aspek pelaksanaan pembangunan pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya.
3. Di samping kegunaan tersebut di atas, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti berikutnya.

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu cara untuk memberikan gambaran mengenai BPD, dalam hal ini peranan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi penelitian ini adalah anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru yang berjumlah 105 Orang dari 7 desa.

b. Sampel

Untuk pengambilan sampel secara representatif digunakan teknik stratifikasi sampling. Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut,

maka dipilih Desa Lempang sebagai desa swadaya, Desa Liburen sebagai desa swakarya, dan Desa Lompo Riaja sebagai Desa Swasembada. Sesuai struktur organisasi BPD dimana terdapat 15 orang pengurus. Jadi jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 45 orang.

Kemudian sebagai informan adalah diambil dari beberapa tokoh-tokoh masyarakat dari ketiga desa yang menjadi sampel yaitu

Ketua KUD

Ketua Karang Taruna

Ketua Kelompok Tani

Imam Desa

Ketua RT

Ketua RW

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang akan digunakan adalah melalui kuesioner yang didukung dengan hasil observasi dan wawancara terhadap responden yang telah dipilih.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini yaitu data yang akan penulis peroleh melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data yang sifatnya teoritis. Selain itu data dapat diperoleh di Kantor Kecamatan dan Kantor Desa dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru. Berupa dokumen-dokumen tertulis dan lain-lain.

4. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang hendak dilakukan, maka teknik atau alat pengumpulan yang dilakukan adalah :

a. Kuesioner

Dalam operasional teknik pengumpulan data, dilakukan melalui cara dengan mengedarkan daftar pertanyaan (angket) yang berstruktur dalam bentuk multiple choice (pilihan ganda) dan isian. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tanpa meminta berbagai hal permasalahan di luar pertanyaan.

b. Observasi

Untuk melihat langsung hasil-hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan penulis mengadakan observasi di beberapa obyek pembangunan yang telah dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data, baik melalui laporan-laporan/dokumen-dokumen maupun secara nyata dengan membuktikan kebenarannya di lapangan

c. Wawancara

Untuk menkonfirmasi data yang diperoleh melalui kuesioner dan hasil observasi, maka penulis mengadakan wawancara secara langsung terhadap responden dan informan yang dianggap dapat memberikan keterangan-

keterangan yang lebih lengkap, serta mampu membahas dengan tuntas tentang permasalahan yang disoroti dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh melalui kuesioner dideskripsikan secara sederhana dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi yang ada dalam tabel akan dianalisis secara kualitatif yang dipadukan dengan hasil observasi dan wawancara untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa, maka perlu melaksanakan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang merupakan rangkaian kegiatan nasional.

Dalam hubungan itu Kuswara (1985 : 20) mengatakan bahwa pembangunan desa mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh dan terkoordinasi.
2. Pembangunan desa adalah mensyaratkan adanya kewajiban bersama yang seimbang dan serasi antara pemerintah dan masyarakat.

3. Pembangunan desa adalah multi sektoral dan merupakan perpaduan daripada program-program sektoral, regional dan Inpres dengan kebutuhan esensial masyarakat.
4. Pembangunan desa adalah merupakan usaha pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan desa baik pedesaan maupun perkotaan.

Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa sesungguhnya pembangunan desa merupakan suatu rangkaian dalam pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

Guna mewujudkan pembangunan desa tersebut, maka telah dibentuk suatu wadah atau lembaga yang akan membantu pemerintah desa dalam rangka pembangunan desa. Wadah itulah disebut Badan Perwakilan Desa (BPD).

Dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa dimana dilakukan Penyempurnaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 huruf d, disebutkan bahwa :

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

Tugas pokok Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah membantu pemerintah desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sebagaimana

yang tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi :

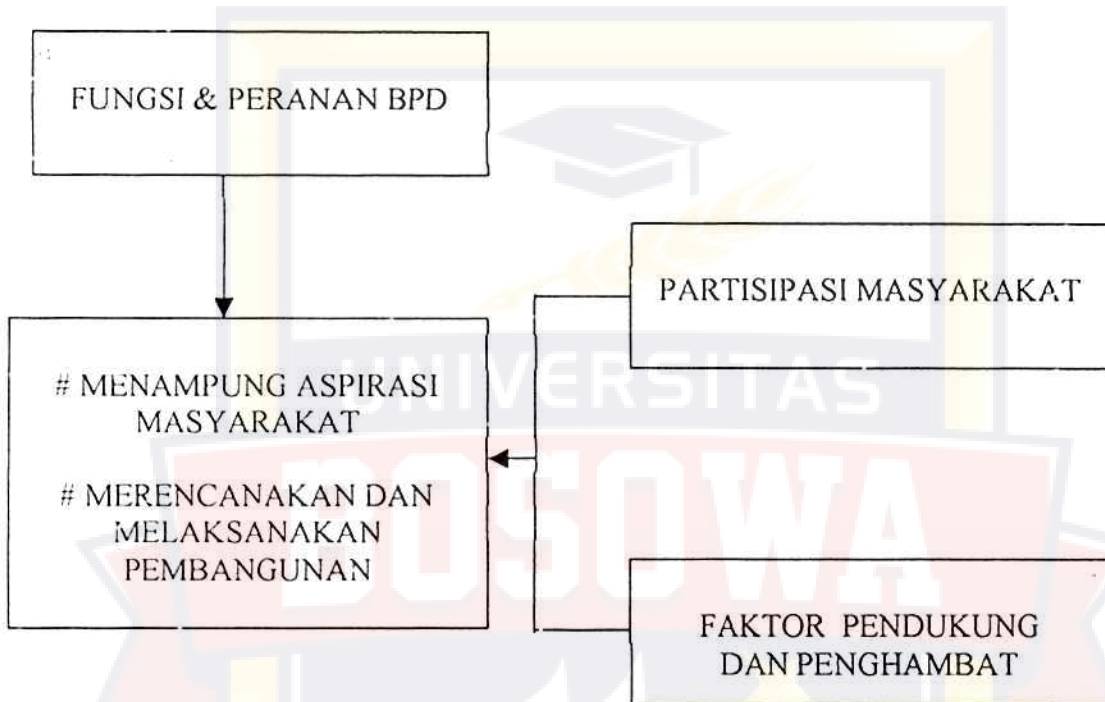
1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah diharapkan untuk memacu pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, yang dalam menjalankan tugas-tugasnya didukung oleh partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri.

Selanjutnya yang dimaksud dengan partisipasi itu sendiri menurut Mubyarto (1985 : 16) adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

Bila dikaitkan pengertian partisipasi dengan masyarakat, maka terbentuklah pengertian partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal berpartisipasi tersebut tidak lepas dari sifat kebersamaan, kegotongroyongan satu sama lain. Kesadaran dan tanggung jawab mereka serta kemampuan dituntut dalam kebersamaan itu.

Sehubungan dengan uraian dan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan masalah pokok yang hendak dikaji, maka dapatlah digambarkan kerangka pemikirang sebagai berikut.



F. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai isi dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi nantinya, maka penulis mencoba menguraikan dalam bentuk sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama terdiri atas : Latar belakang masalah, pembatasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat pengertian pembangunan desa, azas dan tujuan pembangunan desa, Peranan dan fungsi BPD, Pengertian otonomi Pemerintah Desa dalam Pembangunan, Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan, dan Strategi Pengembangan Partisipasi

Bab ketiga menguraikan tentang keadaan geografis, keadaan demografis, keadaan perekonomian, keadaan sosial budaya, dan struktur organisasi kecamatan Tanete Riaja.

Bab keempat membahas tentang fungsi BPD dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, pengaruh partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi fungsi BPD.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pembangunan Desa

Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk berbagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mengisi kemerdekaan bangsa, maka perlu melaksanakan kegiatan pembangunan di tingkat desa yang merupakan rangkaian kegiatan nasional.

Prayitno dan Arsyad (1987 : 15) memberikan pengertian bahwa "pembangunan pedesaan adalah suatu strategi pembangunan yang dirangsang dalam peningkatan kehidupan ekonomi dan sosial dari kelompok khusus masyarakat, yaitu si miskin di pedesaan.

Melihat pengertian yang dikemukakan di atas, peneliti melihat bahwa pembangunan yang dimaksud adalah dibatasi hanya pembangunan pada kelompok khusus yaitu hanya si miskin di pedesaan.

Kemudian oleh Kuswara (1985 : 20) memberikan pengertian yang lebih luas yaitu :

1. Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat yang dalam penyelenggaraannya harus secara menyeluruh dan terkoordinasi.

2. Pembangunan desa adalah mensyaratkan adanya kewajiban bersama yang seimbang dan serasi antara pemerintah dan masyarakat.
3. Pemabangunan desa adalah multi sektoral dan merupakan perpaduan daripada program-program sektoral, regional dan Inpres dengan kebutuhan esensial masyarakat.
4. Pembangunan desa adalah merupakan usaha pemerataan danpenyebarnya pembangunan keseluruhan desa baik pedesaan maupun perkotaan.

Dari pengertian tersebut di atas jelas bahwa sesungguhnya pembangunan desa merupakan suatu rangkaian dalam pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.

Lebih lanjut dikemukakan bahwa pembangunan desa yang megutamakan pembangunan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan keterpaduan pembangunan wilayah, khususnya antar kawasan dan antar perkotaan dan pedesaan serta keterpaduan pembangunan sektoral, peningkatan investasi pedesaan yang serasi dengan investasi perkotaan, pengembangan sumber daya manusia pedesaan, pengembangan kelembagaan misalnya lembaga BPD.

Pengembangan kelembagaan BPD merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan desa secara umum, dimana mampu berperan aktif dalam pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan dan makin meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan.

B. Azas dan Tujuan Pembangunan Desa

Dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar

Haluan Negara dinyatakan bahwa :

Pembangunan dilaksanakan merata di seluruh tanah air bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian masyarakat melainkan untuk masyarakat. Pembangunan itu benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan social yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Sesuai dengan pernyataan tersebut, maka asas pembangunan desa adalah asas-asas yang termuat dalam asas-asas pembangunan nasional yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai berikut :

1. Asas Keimanan dan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bahwa usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan luhur yang menjadi landasan spritual, moral dan etika dalam rangka pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
2. Asas Manfaat, bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan pribadi warga negara, serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.
3. Asas Demokrasi Pancasila, bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Asas Adil dan Merata, bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata disemua lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
5. Asas Kesinambungan, Keresasian dan Keselarasan antara kepentingan dunia danakhirat, material dan spritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat dan

negara, pusat dan daerah serta antar daerah, kepentingan perikehidupan darat, laut, udara dan dirgantara serta kepentingan nasional dan internasional.

6. Asas Hukum, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggaraan negara harus taat kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
7. Asas Kemandirian, bahwa pembangunan nasional berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
8. Asas Kejuangan, bahwa dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, penyelenggaraan negara dan masyarakat harus memilih mental, tekad jiwa, dan semangat pengabdian serta ketaatan dan disiplin yang tinggi dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
9. Asas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, bahwa agar pembangunan nasional dapat memberikan kesejahteraan rakyat lahir dan bathin yang setinggi-tingginya, penyelenggaraan perlu menerapkan nilai-nilai ilmu pengetahuan dan teknologi secara dan bertanggung jawab dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai iuhur bangsa.

Selanjutnya mengenai tujuan pembangunan desa yang tercermin dalam pembangunan nasional secara umum yang ditetapkan dalam ketetapan MPR Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara telah dinyatakan bahwa :

Pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Tujuan pembangunan nasional tersebut adalah tujuan seluruh bangsa Indonesia, dengan demikian tujuan pembangunan desa merupakan bagian dari tujuan Pembangunan Nasional yang harus diselenggarakan secara terpadu, terarah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Sejalan dengan itu, maka pembangunan desa lebih diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup. Kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang makin merata dan adil serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya.

Adapun pembangunan desa untuk jangka panjang adalah dirasakan untuk mengembangkan desa-desa di seluruh tanah air dan desa swadaya (desa tradisional) dan desa transisi (desa swakarsa) menjadi desa swasembada (desa maju) dan berkembang sebagai prakondisi pemantapan kerangka landasan pembangunan desa menuju tinggal landas, sedangkan jangka pendek adalah menunjang sektor-sektor pembangunan yang menjadi prioritas Pembangunan Nasional.

Pembangunan desa dan masyarakat pedesaan terus didorong melalui peningkatan koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pembangunan kemampuan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa swadaya dan desa swakarsa menuju desa swasembada.

Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Pembangunan

berbagai sarana dan prasarana perekonomian termasuk koperasi dan lembaga keuangan ditingkatkan agar mampu berperan serta dalam pengembangan ekonomi rakyat serta makin meningkatkan swadaya masyarakat pedesaan dalam pembangunan.

Menurut A.W. Wijaya (1993 : 64) bahwa : *“Tujuan Bantuan Desa adalah untuk merangsang usaha swadaya gotong royong masyarakat dalam memperlancar usaha-usaha dan kegiatan pembangunan pedesaan”*.

Dengan demikian jelaslah bahwa tujuan bantuan desa tersebut adalah merupakan peran serta pemerintah dalam pengembangan ekonomi rakyat dengan melalui pembangunan berbagai sarana dan prasarana perekonomian.

C. Peranan dan Fungsi BPD

Dalam usaha melaksanakan peranannya, maka Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai fungsi seperti yang dikemukakan oleh Santoso Satropetro (1986 : 780) bahwa :

1. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa/kelurahan.
2. Menanamkan rasa pengertian dan kesadaran penghayatan dan pengamalan Pancasila.
3. Menggali dan memanfaatkan potensi serta menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan.
4. Merupakan sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat serta warga masyarakat itu sendiri.
5. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
6. Membina dan menggerakkan potensi pemuda untuk pembangunan.
7. Membina kerjasama antara lembaga yang ada dalam masyarakat untuk pembangunan.
8. Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sejahtera.

9. Melaksanakan tugas lain dalam rangka membantu pemerintah desa /kelurahan untuk menciptakan ketahanan yang mantap.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Badan Perwakilan Desa (BPD) ini hendaknya dapat mewujudkan fungsinya di tengah-tengah masyarakat dalam pembangunan. Oleh karena itu tugas pokok Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah membantu pemerintah desa dan kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi :

1. Mengayomi yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
2. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.
3. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.
4. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

Keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah diharapkan untuk memacu pelaksanaan pembangunan di wilayah pedesaan, yang dalam menjalankan tugas-tugasnya didukung oleh partisipasi aktif masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dapat dikaitkan dengan tujuan pembangunan nasional yakni untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Untuk itu usaha ini akan muda dicapai jika usaha-usaha pembangunan diikuti oleh usaha menumbuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi setiap dalam melaksanakan program pembangunan demi terwujudnya tujuan nasional melalui

kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi setiap dalam melaksanakan program pembangunan demi terwujudnya tujuan nasional melalui wadah Badan Perwakilan Desa (BPD).

Mengingat betapa pentingnya peranan Badan Perwakilan Desa dalam pembangunan desa, maka keuletan dan ketanggugahannya sangat diharapkan agar dapat menggerakkan kemampuan masyarakat dalam pembangunan khususnya di desa/kelurahan. Oleh karena itu Badan Perwakilan Desa sebagai wadah dan organisasi masyarakat pertumbuhan dan perkembangannya mendapatkan perlindungan, bimbingan dari pemerintah.

D. Pengertian Otonomi Pemerintah Desa Dalam Pembangunan

Desa atau pedesaan sejak awal berdirinya sampai kemudian mencapai perkembangan-perkembangannya hanyalah atas kekuatan dan kegiatan para warga desanya. Desa dapat berkembang karena para warganya mengutamakan asas-asas yang mempunyai nilai yang universal.

Hampir di seluruh tanah air tata kehidupan di desa-desa mempunyai persamaan, yaitu dengan asas-asas dimiliki para warga desa dapat menciptakan dan melangsungkan pemerintahannya dengan kemampuan para warga desa sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap desa di tanah air kita, telah memiliki sifat otonomi dalam arti mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekuatan atau kemampuan sendiri.

Keadaan pemerintah desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-Undang Lama yang pernah ada, akibatnya desa dan pemerintahan desa yang ada sekarang ini bentuk dan coraknya masih beraneka ragam masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, yang kadang-kadang merupakan hambatan untuk pembinaan dan pengendalian yang insentif guna peningkatan taraf hidup masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah dan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1998 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, hanya mengatur desa dari segi pemerintahannya. Undang-Undang ini tetap mengakui adanya kesatuan masyarakat hukum, adat istiadat dan kebiasaan yang masih hidup sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan Ketahanan Nasional.

Identik dengan itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 merumuskan bahwa "*Pemerintahan desa adalah kegiatan dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat*".

Selanjutnya A.W. Widjaya (1992 : 19) memberikan pengertian bahwa :

Otonomi desa adalah :

- *Tumbuh dalam masyarakat*
- *Diperoleh secara tradisional*
- *Bersumber dari hukum adat*

Jadi desa bersifat otonom yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri berbeda dengan kelurahan yang sifatnya sebagai wilayah administrative yaitu menyelenggarakan pemerintahannya, ternyata sifat otonom desa itu masih hidup dan dipertahankan hingga sekarang, segala sesuatunya yang mengenai pemerintahan desa disempurnakan, sumber pendapatan desa itu sendiri, juga sumbangan-sumbangan dari pemerintah (pusat), dari pemerintah daerah dan sebagian pajak dan retribusi daerah yang diberikan kepada desa. Jadi setiap tahunnya Kepala Desa menetapkan Anggaran Pemerintahan dan Pengeluaran Keuangan Desa melalui musyawarah dan mufakat dengan Lembaga Musyawarah Desa.

Demikian lestarnya sifat otonom dari pemerintah desa itu, menurut penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa point (4), karena keadaan pemerintahan desa sekarang ini adalah sebagai akibat pewarisan dari Undang-Undang Lama yang pernah ada yang mengatur desa.

E. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan

Pengertian partisipasi sebenarnya berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "participation" yang berarti mengambil sebagian secara aktif atau kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.

Bila dikaitkan pengertian partisipasi dengan masyarakat, maka terbentuklah pengertian partisipasi masyarakat. Masyarakat dalam hal berpartisipasi tersebut tidak lepas dari sifat kebersamaan, kegotong royongan satu sama lain. Kesadaran dan tanggung jawab mereka serta kemampuan dituntut dalam kebersamaan itu.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) telah ditentukan bahwa hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Selanjutnya di dalam GBHN juga disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah

“Mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana pri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Sejak Pelita III, pemerintah telah bertekad untuk semakin meningkat gerak pembangunan di wilayah pedesaan. Hal ini mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya bertempat tinggal di daerah pedesaan, sehingga jenis pembangunan baik program sektoral, regional dan Inpres dipusatkan di daerah pedesaan.

Oleh karena itu pembangunan desa terlebih dahulu ditujukan pada perubahan kehidupan masyarakat pedesaan yang umumnya masih terbelakang dan bersifat tradisional ke arah kehidupan yang lebih maju dan modern.

Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

Desa disebutkan bahwa :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia.

Namun demikian, masyarakat desa itu mempunyai ciri-ciri lain dengan masyarakat lainnya seperti yang dinyatakan Landis dalam Joseph Riwu Kayo (1985 : 212) adalah :

1. Untuk kepentingan statistik desa merupakan suatu daerah yang berpenduduk kurang dari 2500 jiwa.
2. Untuk tujuan analisis psikologi sosial, masyarakat desa mempunyai derajat intimitas dan formalitas yang tinggi. Sedangkan masyarakat kota mempunyai hubungan sosial yang bersifat impersonal.
3. Untuk tujuan analisis ekonomi, pertanian merupakan kepentingan masyarakat.

Untuk menampung usaha-usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan, maka telah dibentuk suatu lembaga yang akan membantu pemerintah desa dari desa swadaya ke desa swakarya menuju desa swasembada. Lembaga itulah yang disebut Lembaga Sosial Desa (LSD). Lembaga Sosial Desa ini berfungsi mewadahi dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan dalam segala bidang dan bertugas melaksanakan dan menggerakkan kegiatan-kegiatan pembangunan di desa.

Secara terinci, pemerintah lewat Departemen Dalam Negeri menggariskan fungsi-fungsi Lembaga Sosial Desa (LSD) sebagaimana yang dikutip dalam bukunya A.W. Widjaja (1992 : 5) yaitu sebagai berikut :

1. Menjadi sarana komunikasi antar pemerintah dan masyarakat, juga antara anggota-anggota masyarakat sendiri.
2. Menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam rangka menunjang program-program pembangunan pemerintah.
3. Menjadi sarana peningkatan keterampilan masyarakat desa.
4. Menjadi sarana modernisasi dalam rangka mengubah pola pemikiran masyarakat yang masih statis – tradisional menjadi dinamis – rasional.
5. Menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wadah dari semua usaha dan kegiatan masyarakat desa dalam pembangunan, maka BPD berusaha menampung dan melaksanakan aspirasi dan inisiatif masyarakat, serta melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan oleh instansi-instansi pemerintah.

Adapun bidang tugas LSD meliputi aspek-aspek sosial ekonomi dan budaya dengan prioritas utamanya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Sektor sosial meliputi usaha-usaha perikemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana. Sektor ekonomi meliputi prasarana, sarana produksi dan konsumsi serta usaha ekonomi lainnya. Sektor budaya meliputi adat istiadat dan agama, pembangunan mental dan tingkah laku masyarakat.

Karena luasnya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Badan Perwakilan Desa.

Sebagai tindak lanjut, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 225 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPD. Kemudian pada tahun 1984 mengeluarkan lagi SK No. 27 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Badan Perwakilan Desa yang pada hakekatnya merupakan penyesuaian dengan keadaan saja.

F. Strategi Pengembangan Partisipasi

Kendatipun partisipasi telah menjadi komponen penting dari pembangunan sehingga praktis hampir semua negara menggunakan secara luas akan kebutuhan partisipasi dalam semua proses pembangunan. Namun di dalam kenyataannya pendekatan yang digunakan selama ini cukup bervariasi dalam mengambil konsep partisipasi. Misalnya saja pendekatan “*top down dan blue print*” pembangunan praktis mengabaikan partisipasi masyarakat.

Strategi pembangunan pada dasarnya ditentukan terlebih dahulu oleh nilai-nilai filsafat kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat bangsa tertentu. Maka di dalam pengembangan partisipasi perlu dilaksanakan berbagai pendekatan seperti :

1. Program pembangunan perlu memperhitungkan pola kehidupan yang ada di masyarakat. Kondisi ini harus dihargai dan diberi nilai. Nilai positif diefektifkan dan dikembangkan, sedang nilai yang dianggap negatif secara perlahan dan persuasive dihilangkan. Demikian pula nilai baru (inovatif) diperkenalkan untuk dihargai oleh masyarakat sebagai nilainya sendiri.
2. Masyarakat desa pada umumnya dikatakan tradisional, namun kita harus mengasumsikan bahwa masyarakat adalah rasional dan obyektif. Bentuk pengujian ke arah itu memang berbeda, atau tidak diketahui, akan tetapi sifat rasional dan obyektif tetap dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat. Ini berarti bahwa para birokrat di daerah jangan sekali-kali menciptakan

kebijaksanaan yang dapat dinilai oleh masyarakat tidak rasional atau tidak obyektif.

3. Melaksanakan suatu pembangunan perlu memperhatikan kondisi dan karakter kehidupan masyarakat yang nyata berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Cara-cara yang standart tidak dapat efektif pada masyarakat pedesaan yang menampilkan perbedaan-perbedaan tradisi, tipe wilayah, kekuatan adat, cara hidup, keadaan fisik, lingkungan dan lain-lain.
4. Program pembangunan harus dapat menyentuh kepentingan masyarakat yang paling mendasar dan dirasakan manfaatnya oleh setiap anggota masyarakat. Karena itu pembangunan desa harus bersifat praktis dan realistik.
5. Pembangunan masyarakat adalah salah satu usaha peningkatan dan pertumbuhan masyarakat. Dalam hal ini kualitas (keterampilan) masyarakat akan sangat besar peranannya.

Agar partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat tercipta dan berkembang maka diperlukan pula strategi yang tepat. Bryant dan White (1989 : 289-299) mengemukakan beberapa strategi yang dapat digunakan dalam mengembangkan partisipasi masyarakat seperti berikut ini :

1. Rancang proyek sesederhana mungkin dan dapat dikelola. Dalam hubungan ini perlu diperhatikan : (1) manfaat proyek sebaiknya dirasakan langsung oleh masyarakat karena apabila masyarakat tidak merasakan manfaat suatu proyek, maka mereka tidak akan memberikan dukungan atau partisipasinya; (2) besarnya proyek diusahakan sekecil mungkin karena proyek yang kecil dapat

dengan mudah melibatkan masyarakat; (3) tugas-tugas yang ada dalam proyek diusahakan sederhana sehingga dapat dikelola dengan baik, dan (4) proyek yang dikembangkan adalah proyek yang menimbulkan “*self help*” artinya menolong diri sendiri.

2. Gunakan organisasi seefektif mungkin dalam mendorong partisipasi masyarakat. Di sini perlu diperhatikan : (a) organisasi lokal yang sudah ada; (b) Membentuk organisasi jika belum ada organisasi yang dapat digunakan; © gunakan kelompok-kelompok kecil dalam memobilisasi masyarakat.
3. Lakukan perubahan mengenai kapasitas masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan : (a) mengembangkan kesadaran yaitu kemampuan untuk melihat dirinya sendiri dan dunia sekelilingnya, dan (b) melakukan pelatihan-pelatihan sehingga kemampuan masyarakat dapat meningkat.

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka disimpulkan bahwa masyarakat tergerak untuk berpartisipasi jika : (a) Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat yang bersangkutan. (b) Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan. (c) Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat. (d) Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan.

Di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya partisipasi tidak segera kelihatan sebelum digerakkan dan dibentuk. Yang memegang peranan dalam menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat adalah pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan motivasi individu itu sendiri. Whang dalam Hyung Ro dan Reforma (1985 : 187) menyatakan bahwa ada empat faktor utama yang mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan desa, yaitu : (a) dorongan pemerintah/pemimpin; (b) peranan kepemimpinan in-formal; (c) peranan organisasi lokal, dan (d) motivasi individu.

Perlu diketahui bahwa karena partisipasi itu penting dalam pembangunan, sementara masyarakat memperlihatkan sikap “antisipatif” terhadap program pemerintah, maka pemerintah dapat saja memaksa agar masyarakat mau ambil bagian dalam pelaksanaan program itu.

BAB III

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Kecamatan Tanete Riaja pada mulanya terdiri dari 12 desa dan satu kelurahan. Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 01 Tahun 2001 tanggal 7 Januari 2001 tentang pembentukan Kecamatan Pujananting dan Kecamatan Balusu, maka Kecamatan Tanete Riaja dibagi dua menjadi Kecamatan Tanete Riaja dan Kecamatan Pujananting, dimana Desa Gettareng, Bulu-Bulu, Pujananting, Jangan-Jangan, Bacu-Bacu dan Pattappa termasuk dalam Kecamatan Pujananting.

Wilayah Kecamatan Tanete Riaja meliputi enam desa dan satu kelurahan, yaitu :

1. Desa Lempang
2. Desa Lompo Tengah
3. Desa Kading
4. Desa Libureng
5. Desa Harapan
6. Desa Mattirowalie
7. Kelurahan Lompo Riaja

Secara geografis Kecamatan Tanete Riaja terletak di bagian selatan Kabupaten Barru dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Barru dan Kabupaten Soppeng
2. Sebelah Selatan : Kecamatan Pujananting
3. Sebelah Timur : Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng
4. Sebelah Barat : Kecamatan Tanete Rilau

Luas wilayah Kecamatan Tanete Riaja seluruhnya adalah 174,37 km² yang dibagi dalam enam desa dan satu kelurahan yang dapat dilihat dalam tabel 1 :

Tabel 1
Pembagian Luas Wilayah Kecamatan Tanete Riaja

No	Desa/kelurahan	Luas (km ²)
1	Lempang	17,63
2	Lompo Tengah	13,23
3	Kading	22,69
4	Libureng	20,24
5	Harapan	53,10
6	Mattiwalie	26,59
7	Lompo Riaja	20,89
J u m l a h		174,37

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Dari 174,37 km² luas wilayah Kecamatan Tanete Riaja dimana sebagian besar penduduknya hidup dari pertanian maka sebagian besar tanah berupa areal pertanian, hutan serta untuk penggunaan lainnya dengan perbandingan yang dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2
Luas Wilayah Kecamatan Tanete Riaja
Menurut Kegunaan Tanah

No	Jenis Penggunaan	Luas (km ²)
1	Pemukiman	27
2	Pertanian sawah	44
3	Pertanian ladang	25
4	Hutan	48
5	Rekreasi dan olah raga	10
6	Fasilitas umum	15
7	Lain-lain	5
Jumlah		174

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Wilayah Kecamatan Tanete Riaja terletak pada ketinggian 200 m di atas permukaan laut dengan curah hujan 1.658 mm/tahun dengan keadaan suhu berkisar antara 18 sampai dengan 34^o celcius.

B. Keadaan Demografis

Keadaan penduduk Kecamatan Tanete Riaja berdasarkan data pada tahun 2001 berjumlah 20.337 jiwa yang terdiri dari 9.671 orang laki-laki dan 10.666 orang perempuan. Perkembangan penduduk Kecamatan Tanete Riaja dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Kecamatan Tanete Riaja

No	Desa/kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lempang	1.330	1.141	2.471
2	Lompo Tengah	1.301	1.659	2.960
3	Kading	1.327	1.530	2.857
4	Libureng	1.324	1.516	2.840
5	Harapan	1.574	1.646	3.220
6	Mattirowalie	1.203	1.425	2.628
7	Lompo Riaja	1.612	1.749	3.361
Kecamatan Tanete Riaja		9.671	10.666	20.337

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Penyebaran penduduk Kecamatan Tanete Riaja tahun 2001 dapat dilihat dalam tabel 4 berikut :

Tabel 4
Distribusi Penduduk Kecamatan Tanete Riaja

No	Desa/kelurahan	Jumlah Penduduk	Persentase terhadap Kecamatan (%)
1	Lempang	2.471	12,15
2	Lompo Tengah	2.960	14,55
3	Kading	2.857	14,05
4	Libureng	2.840	13,96
5	Harapan	3.220	15,92
6	Mattirowalie	2.628	12,92
7	Lompo Riaja	3.361	16,54
Kecamatan Tanete Riaja		20 337	100

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Tabel 4 tentang penyebaran penduduk di setiap desa/kelurahan terhadap kecamatan menunjukkan proporsi penduduk terbesar berada di desa/kelurahan Lompo Riaja yaitu 16,54 %. Sebaliknya proporsi penduduk terkecil berada di Desa Lempang yaitu 12,15 %. Berdasarkan angka yang ditunjukkan tersebut dapat disimpulkan bahwa pola penyebaran penduduk Kecamatan Tanete Riaja merata di seluruh desa/kelurahan.

C. Keadaan Perekonomian

Keadaan penduduk Kecamatan Tanete Riaja menurut mata pencahariannya tahun 2000 dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Keadaan Penduduk Kecamatan Tanete Riaja
Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	701	10,12
2	TNI/Polri	24	0,35
3	Pensiunan PNS/TNI/Polri	162	2,34
4	Karyawan Swasta	27	0,39
5	Petani	5.492	79,26
6	Pedagang	264	3,81
7	Pengrajin Industri	163	2,35
8	Jasa/angkutan	54	0,78
9	Lain-lain	42	0,60
Jumlah		6.929	100,00

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Tabel 5 menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk hidup dalam bidang pertanian, karena secara tradisional kehidupan sebagai petani diurungkan secara turun temurun dan didukung oleh tanah yang cocok untuk pertanian serta belum ada kegiatan industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Selebihnya bekerja sebagai PNS dan hanya sebagian kecil yang bekerja di sektor-sektor lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian yang paling tinggi dan menonjol adalah kegiatan di bidang pertanian.

Kegiatan menunjang perekonomian dan pembangunan maka perlu didukung dengan sarana/fasilitas perekonomian yang memadai. Fasilitas perekonomian yang terdapat di Kecamatan Tanete Riaja yaitu :

1. Pasar tradisional sebanyak lima buah yang melayani pembelian baik secara eceran maupun grosir.

2. Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak tujuh buah yang terdapat di setiap desa/kelurahan.
3. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang terletak di Desa Kading.
4. Toko/kios/warung sebanyak 117 buah.
5. Jaringan jalan sepanjang 219 km yang terdiri dari 24 km jalan propinsi, 53 km jalan kabupaten dan 141 km jalan desa.

D. Keadaan Sosial Budaya

Ditinjau dari aspek sosial budaya, penduduk Kecamatan Tanete Riaja sebagian besar adalah suku Bugis. Selebihnya adalah dari suku Jawa, Makassar, Toraja, Batak dan lain-lain. Karena mayoritas penduduknya adalah suku Bugis maka budaya yang paling menonjol dalam kehidupan sehari-hari adalah kebudayaan dan adat istiadat Bugis.

Selain aspek budaya, keadaan Kecamatan Tanete Riaja dapat pula dilihat dari aspek sosial yang terdiri dari pendidikan, kesehatan dan agama.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu mata rantai yang amat penting dalam rangka meningkatkan taraf kecerdasan dan kehidupan suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan semakin maju pula tingkat berpikir dan berperilaku dalam interaksi sesamanya. Keadaan pendidikan di Kecamatan Tanete Riaja dapat dilihat dari keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dan sarana

pendidikan yang tersedia. Keadaan penduduk menurut tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel 6.

Tabel 6
Keadaan Penduduk Kecamatan Tanete Riaja
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum /tidak tamat SD	5.170
2	Tamat SD	8.354
3	Tamat SLTP	4.299
4	Tamat SLTA	2.829
5	Tamat Akademi / Perguruan Tinggi	346
6	Pasca sarjana	-
J u m l a h		20.998

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Tabel 6 dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk Kecamatan Tanete Riaja adalah lulusan SD, sedangkan lulusan akademi/perguruan tinggi biasanya adalah para pegawai negeri termasuk guru.

Untuk mengetahui keadaan sarana pendidikan dapat dilihat dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7
Jumlah Sarana Pendidikan di Kecamatan Tanete Riaja

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah/buah
1	Taman Kanak-Kanak	9
2	Sekolah Dasar	40
3	SLTP	5
4	SMU	4
5	Akademi/Perguruan Tinggi	-

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Tabel 7 terlihat bahwa sarana pendidikan yang terdapat di Kecamatan Tanete Riaja sudah cukup baik, yaitu sudah tersedia dari Taman Kanak-Kanak sampai tingkat SMU. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi harus keluar daerah atau ke ibukota kabupaten.

2. Kesehatan

Keadaan kesehatan di Kecamatan Tanete Riaja dapat dilihat dari keadaan kesehatan penduduk yang meliputi kesehatan penduduk secara umum dan sarana kesehatan yang tersedia. Keadaan kesehatan penduduk secara umum dapat dikatakan baik. Hal ini berdasarkan kurangnya kasus-kasus penyakit menular seperti penyakit malaria, demam berdarah, dan kolera. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kesehatan termasuk cukup tinggi, tergambar dari banyak ibu-ibu hamil dan bayi dibawah lima tahun (Balita) yang berkunjung ke Puskesmas maupun pos-pos pelayanan terpadu (Posyandu) yang dilaksanakan setiap bulan dan menjangkau hingga ke pelosok desa.

Jumlah sarana kesehatan yang terdapat di Kecamatan Tanete Riaja dapat dilihat dalam tabel 8 berikut :

Tabel 8
Jumlah Sarana Kesehatan di Kecamatan Tanete Riaja

No	Jenis Sarana	Jumlah/buah
1	Rumah Sakit	-
2	Puskesmas	2
3	Puskesmas Pembantu	5
4	Posyandu	24
5	Apotek	1
6	Dokter Praktek	1

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Agama

Keadaan sosial budaya bidang agama di Kecamatan Tanete Riaja dapat dilihat dari komposisi penduduk menurut agamanya dan sarana peribadatan yang ada. Komposisi penduduk menurut agama yang dianutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Komposisi Penduduk Kecamatan Tanete Riaja
Menurut Agama

No	Agama	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Islam	20.252	99,58
2	Katolik	15	0,07
3	Protestan	70	0,35
4	Hindu	-	-
5	Budha	-	-
	J u m l a h	20.337	100

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Tabel 9 terlihat bahwa sebagian besar atau 99,58 % penduduk adalah pemeluk agama Islam. Selebihnya adalah penganut agama Protestan 0,35% dan Katolik 0,07 %. Kehidupan beragama di Kecamatan cukup baik, terlihat dari tidak adanya kasus yang menyangkut perselisihan antar umat beragama dimana setiap penduduk menjalankan ibadah menurut keyakinan agamanya masing-masing dengan bebas dan penuh rasa aman.

Untuk menunjang kehidupan beragama di Kecamatan Tanete Riaja telah dibangun sarana peribadatan seperti yang terlihat pada tabel 10.

Tabel 10
Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Tanete Riaja

No	Agama	Jumlah
1	Mesjid	37
2	Mushola	2
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pura	-

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

E. Struktur Organisasi Kecamatan Tanete Riaja

Struktur Kecamatan Tanete Riaja adalah berdasarkan pola minimal dimana hanya terdapat dua seksi, yaitu Seksi Pemerintahan dan Seksi Pembangunan Masyarakat Desa.

Struktur kecamatan terdapat tiga jabatan yang tidak terisi, yaitu urusan perencanaan, sub seksi sarana, prasarana dan pelayanan umum serta seksi perekonomian, produksi dan distribusi. Pegawai Kecamatan Tanete Riaja berjumlah 11 (sebelas) orang yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 11
Daftar Pegawai Kecamatan Tanete Riaja Menurut Pangkat,
Jabatan, Masa Kerja dan Pendidikan

No	Nama	Pangkat	Jabatan	Masa Kerja	Pendidikan
1	Drs. Iskandar A.	III/d	Camat	17	IIP
2	Abdul Rahim,	III/a	Sekcam	6	STPDN
3	M. Anas Baba	III/a	Kasi Pemerintahan	20	SMA
4	Andi Muh. Tamar	III/a	Kasi PMD	15	STIA Algazali
5	H. Haerudin	III/a	Kasubsi Pemerintah. Umum dan Kelurahan	26	SMA
6	M. Aris	III/a		15	SMA
7	Djuhari	II/d	Kaur Umum	14	SMA

8	Jamaluddi	II/d	Kasubsi Kependudukan	14	SMA
9	Nahiruddin	II/d	Kasubsi Tramtib	14	SMA
10	Hasbiah	II/d	Kasubsi Kesej. Sosial	14	SMA
11	Abdul Hamid	II/a		14	SMP

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

Terdapat juga kelompok jabatan fungsional yang membantu sebagian tugas camat dalam bidang teknis yang terdiri dari instansi vertikal maupun otonom. Kelompok jabatan fungsional tersebut dapat dilihat dalam tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12
Kelompok Jabatan Fungsional

No.	Nama	Pangkat	Jabatan	Instansi
1	Yahya M, Am.D	II/d	Ka. BPP Jalanru	BPIP
2	Awaluddin, AM,D	II/b	PPL	Sda
3	M. Ashar	II/a	PPL	Sda
4	Abdul Hayat	II/c	PPL	Sda
5	M. Sudirman	III/a	PPL	Sda
6	Mu. Arief	II/c	PPL	Sda
7	Abdul Razak	II/c	PPL	Sda
8	Ismail Bora	III/b	Koord. PLKB	BKKBN
9	Firdaus	III/a	PLKB	Sda
10	Mardiah	II/a	PLKB	Sda
11	Andi Nurlefi	II/d	PLKB	Sda
12	Ir. Nursiah	III/a	PLKB	Sda
13	Sultan, SE	III/a	Koord. Jupen	Dinas Informasi
14	Dra. Charlly Masse	III/a	Jupen	Sda
15	Dra. Muskarama	III/a	Jupen	Sda
16	Zainuddin, BA	III/a	Jupen	Sda
17	Syamsul Rizal	III/a	Mantri Statistik	BPS
18	Kane Dg. Massiki	III/a	Kamawil Hansip	Mawil Hansip

Sumber : Kantor Kecamatan Tanete Riaja, Tahun 2001

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan BPD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan.

Berbicara tentang pelaksanaan pembangunan, maka pada dasarnya tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam suatu wadah atau lembaga yang lebih dikenal dalam pembangunan pedesaan adalah Badan Perwakilan Desa yang disingkat dengan nama BPD. Karena sebagaimana diketahui pula bahwa dalam pengertian pembangunan itu sendiri tak terkecuali pembangunan terkandung pengertian seluruh rakyat atau bangsa sebagai subyek dan sekaligus sebagai obyek pembangunan.

Demikian dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang tercermin dalam hakekat pembangunan nasional di mana memberikan gambaran yaitu betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam menampung. Sehingga dengan demikian, dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan kegiatan pembangunan pedesaan, maka partisipasi masyarakat merupakan unsur mutlak yang harus ada di dalamnya.

Perlunya partisipasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pedesaan yang merupakan salah satu fungsi BPD yang terpenting dalam kegiatan pembangunan, tidak hanya karena kemampuan pemerintah terutama dalam hal ini perangkat desa sangat terbatas untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan, akan tetapi yang lebih

penting lagi adalah bahwa pembangunan pedesaan tersebut harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Hal ini dibenarkan oleh Camat Tanete Riaja dari hasil wawancara peneliti bahwa agar manfaat pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut dapat dirasakan mangfaatnya oleh seluruh masyarakat, maka yang menjadi terpenting di sini adalah mengetahui dengan jelas aspirasi-aspirasi yang timbul dari masyarakat yang bersangkutan, di mana aspirasi-aspirasi yang timbul tersebut menjadi bahan masukan dalam menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan yang akan dilaksanakan. Pemerintah khususnya perangkat-perangkat desa yang ada hanya merupakan fasilitator-fasilitator dalam mewujudkan pembangunan yang direncanakan.

Identik dengan tersebut di atas, maka untuk memperoleh aspirasi-aspirasi atau masukan-masukan dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pedesaan dewasa ini tidak hanya berarti bahwa rakyat memikul beban pembangunan karena aspirasi-aspirasinya atau perencanaannya, akan tetapi juga dalam menerima kembali dan memanfaatkan hasil-hasilnya. Hal ini mengingatkan bahwa kesemuanya itu merupakan hak daripadanya, karena pada dasarnya setiap masyarakat mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk memanfaatkan proses pembangunan yang telah dilaksanakan. Di samping itu, berhak menikmati hasil pembangunan. Tetapi juga sebagai kewajiban karena pada dasarnya semua

warga masyarakat wajib ikut serta memikul beban pembangunan dan menyukseskan jalannya pembangunan itu.

Partisipasi memang selalu ditekankan untuk menyadarkan rakyat agar mereka merasa memiliki program-program pembangunan pedesaan yang dilaksanakan, sehingga hasil-hasil pembangunan tidak hanya bermanfaat di masa sekarang saja, akan tetapi diharapkan dapat pula bermanfaat di masa-masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa Ketua Badan Perwakilan Desa dapat disimpulkan bahwa agar hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan melalui suatu perencanaan dari partisipasi masyarakat itu sendiri tersebut tidak hanya bermanfaat pada masa-masa sekarang ini, maka hendaknya masyarakat luas menjaga dan memelihara kelestarian dan keberadaannya supaya nantinya dapat pula dinikmati oleh anak cucu kita.

Sesuai hal tersebut menurut salah beberapa tokoh masyarakat dan anggota BPD Wilayah Tanete Riaja yang sempat diwawancarai oleh peneliti diungkapkan bahwa dengan adanya kesadaran masyarakat merasa memiliki hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai tersebut, maka dengan sendirinya pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut dapat lestari dan bermanfaat bagi warga masyarakat, baik masyarakat setempat maupun dari luar wilayah Kecamatan Tanete Riaja.

Partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam wadah BPD pada dasarnya hal yang menyangkut nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi, artinya

berpartisipasi tidak hanya berarti menyumbang tenaga tanpa dibayar, akan tetapi partisipasi harus diartikan yang lebih luas yaitu ikut serta. Hal ini sebenarnya adalah juga untuk menghindarkan rakyat dari status sebagai obyek pembangunan tetapi menempatkan rakyat sebagai subyek atau pelaku pembangunan.

Adapun Peranan BPD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan yang akan diuraikan pada bagian ini dibatasi pada 6 (enam) indikator yaitu : menerima/menampung aspirasi masyarakat, memotivasi masyarakat, membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, keikutsertaan merencanakan pembangunan desa, menyusun program kerja, dan melaksanakan program kerja. Sehubungan dengan hal tersebut telah diperoleh data mengenai pelaksanaan peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat yang diuraikan berdasarkan aspek-aspek indikator peranan BPD hasil pengisian kuesioner yang dikonfirmasikan dengan wawancara dengan informan yang ada dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

1. Menerima/Menampung Aspirasi Masyarakat

Implementasi pembangunan pedesaan bukan hanya tanggung jawab Kepala Desa, tetapi adalah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. Untuk ketertiban pelaksanaan pembangunan, maka tentunya pembangunan yang dilaksanakan harus sesuai aspirasi masyarakat agar hasil-hasil pembangunan dapat efektif dan efisien. Untuk menampung aspirasi masyarakat tentu harus melalui suatu wadah, dimana pada tingkat desa disebut

BPD (Badan Perwakilan Desa) yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa utamanya dalam rapat/penyusunan perencanaan pembangunan.

Untuk mengetahui keaktifan BPD menerima/menampung aspirasi masyarakat dideskripsikan pada Tabel 13.

Tabel 13
Keaktifan Anggota BPD Menerima/Menampung
Aspirasi Masyarakat

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Selalu	17	37,78	
2	Sering	24	53,33	
3	Jarang	4	8,89	
4	Tidak pernah	0		
	Jumlah	45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 1

Data tabel 13 menunjukkan bahwa anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja sudah tergolong aktif menerima dan menampung aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden yaitu 24 orang atau 53,33 persen responden yang menyatakan “sering” menerima dan menampung aspirasi masyarakat, dan 17 orang atau 37,78 persen yang menyatakan “selalu” menerima dan menampung aspirasi anggota masyarakat. Kemudian 4 orang atau 8,89 persen responden yang menyatakan “jarang” menerima dan menampung aspirasi masyarakat, dan tidak ada responden yang menyatakan “tidak pernah” menerima dan menampung aspirasi masyarakat.

2. Memotivasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan motivasi diartikan sebagai “dorongan” individual untuk melakukan sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Munculnya dorongan untuk mencapai tujuan tertentu itu disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain manfaat yang akan diperoleh dari sesuatu yang akan dilakukan, kemampuan individu dan pendidikan. Ketiga faktor inilah yang menjadi tanggung jawab BPD untuk disampaikan kepada masyarakat.

Untuk mengetahui keaktifan anggota BPD memotivasi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan disajikan pada tabel 14.

Tabel 14
Keaktifan Anggota BPD Memotivasi Anggota Masyarakat
Untuk Berpartisipasi Dalam Pembangunan

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Selalu	19	42,22	
2	Sering	21	46,67	
3	Jarang	5	11,11	
4	Tidak pernah	0	0	
	J u m l a h	45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 2

Data tabel 14 menunjukkan bahwa anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja sudah tergolong aktif memotivasi anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden yaitu 21 orang atau 46,67 persen responden yang menyatakan “sering” memberi motivasi anggota masyarakat, dan 19 orang atau

42,22 persen yang menyatakan “selalu” memberi motivasi anggota masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan. Kemudian 5 orang atau 11,11 persen responden yang menyatakan “jarang” memberi motivasi masyarakat, dan tidak ada responden yang menyatakan “tidak pernah” memberi motivasi anggota masyarakat agar mereka turut berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat,

Tabel 15
Keaktifan Anggota BPD Membantu Pemerintah
Memecahkan Masalah Pembangunan

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Selalu	5	11,11	
2	Sering	17	37,78	
3	Jarang	20	44,44	
4	Tidak pernah	3	6,67	
	J u m l a h	45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 3

Data tabel 15 menunjukkan bahwa anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja sudah tergolong kurang aktif membantu pemerintah memecahkan masalah-masalah pembangunan. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden yaitu 20 orang atau 44,44 persen responden yang menyatakan “jarang” membantu pemerintah dalam hal ini Kepada Desa untuk memecahkan masalah-masalah pembangunan, dan 17 orang atau 37,78 persen yang menyatakan “sering” membantu pemerintah memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi. Kemudian 5 orang atau 11,11 persen responden

yang menyatakan “selalu” membantu pemerintah memecahkan masalah pembangunan, dan 3 orang atau 6,67 persen responden yang menyatakan “tidak pernah” membantu pemerintah memecahkan masalah pembangunan yang dihadapi.

4. Keikutsertaan merencanakan pembangunan desa.

Setiap tahun desa/kelurahan membuat rencana pembangunan yang dibuat dalam forum Musyawarah Pembangunan Desa (Musbang Desa) pada masing-masing desa. Forum ini memberi kesempatan kepada masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasi dan inisiatifnya, dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan. Dalam penyusunan program kerja pembangunan desa, maka yang menjadi pertimbangan adalah potensi sumber daya baik potensi fisik, sosial maupun kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada rencana pembangunan regional dan nasional.

Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa adalah kesempatan anggota BPD sebagai wakil seluruh masyarakat desa untuk menyalurkan aspirasinya. Untuk itu kehadiran seluruh anggota BPD dalam musyawarah pembangunan desa sangat diharapkan.

Untuk mengetahui keaktifan anggota BPD mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa disajikan pada tabel 16.

Tabel 16
Keaktifan Anggota BPD Mengikuti Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Selalu	25	55,56	
2	Sering	20	44,44	
3	Jarang	0	0	
4	Tidak pernah	0	0	
J u m l a h		45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 4

Data tabel 16 menunjukkan bahwa anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja sudah tergolong sangat aktif mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden yaitu 25 orang atau 55,56 persen responden yang menyatakan “selalu” hadir mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan 20 orang atau 44,44 persen responden yang menyatakan “sering” mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa.

5. Menyusun program kerja.

Pembangunan pedesaan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam musyawarah penyusunan program kerja, maka aspirasi dan kebutuhan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menyusun rencana pembangunan. Oleh karena itu keterlibatan dan kehadiran tokoh-tokoh dalam penyusunan program kerja sangat bermanfaat dan membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk mengetahui keaktifan anggota BPD mengikuti musyawarah penyusunan program kerja kepala desa disajikan pada tabel 17.

Tabel 17
Keaktifan Anggota BPD Menyusun Program Kerja Kepala Desa

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Selalu	5	11,11	
2	Sering	15	33,33	
3	Jarang	17	37,78	
4	Tidak pernah	8	17,78	
	Jumlah	45		

Sumber; Diolah dari angket nomor 5

Data tabel 17 menunjukkan bahwa anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tancte Riaja tergolong kurang aktif mengikuti penyusunan program kerja Kepala Desa. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden yaitu 17 orang atau 37,78 persen responden yang menyatakan “jarang” mengikuti penyusunan program kerja Kepala Desa, dan 15 orang atau 33,33 persen yang menyatakan “sering” mengikuti musyawarah penyusunan program kerja Kepala Desa. Kemudian 8 orang atau 17,78 persen responden yang menyatakan “tidak pernah” mengikuti musyawarah penyusunan program kerja Kepala Desa, dan 5 orang atau 11,11 persen responden yang menyatakan “selalu” mengikuti musyawarah penyusunan program kerja Kepala Desa.

6. Melaksanakan program kerja.

Peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa akan membantu pemerintah desa untuk

mencapai tujuan pembangunan. Dengan melihat mekanisme perencanaan pembangunan desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan perpaduan antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan. Melalui mekanisme dari bawah ke atas, masyarakat dapat menyalurkan aspirasi, permintaan, atau tuntutan kepada pemerintah. Hal yang demikian semangat pembangunan masyarakat berakar dari prinsip demokrasi yang dapat menumbuhkan motivasi masyarakat berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan desa.

Untuk mengetahui keaktifan anggota BPD ikut melaksanakan program kerja pembangunan desa disajikan pada tabel 18.

Tabel 18
Keaktifan Anggota BPD Melaksanakan
Program Kerja Pembangunan

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Selalu	9	20	
2	Sering	23	51,11	
3	Jarang	13	28,89	
4	Tidak pernah	0	0	
	J u m l a h	45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 6

Data tabel 18 menunjukkan bahwa anggota pengurus BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja sudah tergolong aktif melaksanakan program kerja /pembangunan yang telah direncanakan bersama.. Hal ini dapat dilihat pernyataan responden yaitu 23 orang atau 51,11 persen responden yang menyatakan “sering” ikut melaksanakan program kerja pembangunan, dan 13

orang atau 28,89 persen yang menyatakan “jarang” mengikuti pelaksanaan program kerja pembangunan yang dilaksanakan. Kemudian 9 orang atau 20 persen responden yang menyatakan “selalu” ikut dalam pelaksanaan program kerja pembangunan yang telah direncanakan secara bersama-sama, dan tidak ada responden yang menyatakan “tidak pernah” mengikuti pelaksanaan program kerja pembangunan yang dilaksanakan di desanya.

B. Pengaruh Partisipasi Dalam Merencanakan dan Melaksanakan Pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih merata di seluruh tanah air, maka daerah-daerah yang masih relatif terbelakang perlu mendapat perhatian yang lebih besar agar keserasian pertumbuhan daerah secara bertahap dapat tercapai. Oleh karena itu peningkatan pembangunan di pedesaan terutama melalui berbagai usaha pendekatan persuasive perlu dilakukan antara lain melalui penumbuhan kesadaran masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Pembangunan di pedesaan diarahkan untuk meletakkan dasar-dasar sosial ekonomi yang kuat sebagai landasan pembangunan nasional jangka panjang dengan sasaran agar desa yang merupakan satu kesatuan terkecil dari administrasi pemerintahan, satu kesatuan yang terkecil ikatan masyarakat yang dapat mempercepat pertumbuhannya menjadi desa swasembada.

Dengan demikian dapat diubah kedudukan desa dari obyek pembangunan yang bertahan di semua bidang melalui pemanfaatan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat. Badan Perwakilan Desa yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat di tingkat desa dalam hal mendorong, menggerakkan dan wadah untuk meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat dalam rangka membangun desanya.

Terhadap pengaruh partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam wadah Badan Perwakilan Desa (BPD) terutama dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja adalah sangat menunjang dan berpengaruh positif, hal ini terbukti dari hasil observasi peneliti di lokasi penelitian bahwa dengan kesadaran dan berfungsinya BPD sebagaimana mestinya tersebut maka nampak dan terasa adanya perubahan-perubahan yang nyata, misalnya saja partisipasi masyarakat melalui pengadaan jamban keluarga di masing-masing rumah, pengadaan pos-pos ronda di masing-masing lingkungan, pembangunan Masjid/Mushallah dan lain-lain partisipasi masyarakat yang kesemuanya diwujudkan dalam bentuk swadaya masyarakat setempat

Demikian dapat dibuktikan dari hasil kuesioner peneliti kepada responden di mana hampir dapat dikatakan bahwa kesemuanya memberikan tanggapan positif atau memberikan tanggapan bahwa dengan keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja, maka terasa ada perubahan-perubahan nyata dan positif.

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai tanggapan-tanggapan responden berkenaan dengan pengaruh partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan dalam prakteknya di Kecamatan Tanete Riaja disajikan pada tabel berikut :

Tabel 19
Tanggapan Responden Mengenai Pengaruh Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Sangat Berpengaruh	28	62,22	
2	Cukup Berpengaruh	17	37,78	
3	Kurang Berpengaruh	0	0	
4	Tidak Berpengaruh	0	0	
	J u m l a h	45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 7

Berdasarkan tabel 19 di atas, dapat dikemukakan bahwa pengaruh partisipasi masyarakat dalam pembangunan, khususnya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru adalah berpengaruh positif dimana terlihat bahwa yang memberikan tanggapan “sangat berpengaruh” sebanyak 28 orang atau 62,22 persen responden, dan yang memberi tanggapan “cukup berpengaruh” sebanyak 17 orang atau 37,78 persen responden. Sedangkan yang memberi tanggapan kurang dan tidak berpengaruh sama sekali tidak ada.

Dalam hubungan itu maka pembangunan desa yang dilaksanakan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru semakin meningkat setelah

berfungsinya BPD sebagaimana mestinya terutama dalam fungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan. Disamping itu telah memberikan hasil yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Menurut Ketua Umum BPD Desa Lompo Riaja H. Muh. Rahim mengatakan bahwa wujud partisipasi masyarakat adalah memberikan sumbangan berupa uang, tenaga, pikiran serta bantuan fasilitas lain yang kesemuanya tanpa ada unsur paksaan.

Partisipasi dalam bentuk bantuan atau sumbangan berupa uang atau bahan bangunan kepada kegiatan pembangunan fisik khususnya yang ada di Desa Lompo Riaja merupakan inisiatif dari masyarakat sendiri tanpa ada unsur paksaan dan intimidasi. Sedangkan dalam bentuk tenaga yang disumbangkan masyarakat adalah ikut bersama-sama bekerja dalam kegiatan pembangunan fisik misalnya mengangkat batu, menggali, menapis pasir dan lain-lain kegiatan partisipasi di luar bentuk uang, bahan bangunan atau fasilitas lainnya.

Disamping itu partisipasi masyarakat yang tidak kalah pentingnya dalam pembangunan fisik yang selama ini terjadi Kecamatan Tanete Riaja adalah partisipasi tukang kayu dan tukang batu yang menyumbangkan tenaganya karena keahlian yang dimiliki.

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, menurut beberapa tokoh masyarakat dan beberapa anggota BPD Kecamatan Tanete Riaja yang sempat

diwawancarai diungkapkan bahwa dengan adanya kebijaksanaan dan inisiatif dari anggota BPD bersama-sama dengan aparat desa untuk mengikutsertakan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan adalah bukan merupakan suatu paksaan, akan tetapi terpanggil dengan sendirinya untuk ikut serta berpartisipasi, meskipun dalam bentuk tenaga saja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Camat Tanete Riaja Drs. Iskandar mengatakan bahwa untuk menunjang pembangunan khususnya di Kecamatan Tanete Riaja memang swadaya dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat menentukan berhasil tidaknya pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa dengan adanya kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat atau mereka banyak melibatkan dirinya untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di desa, maka proses pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

Ditambahkan bahwa wujud lain dari partisipasi masyarakat desa Kecamatan Tanete Riaja terhadap pembangunan yang ada adalah keterlibatan dan keikutsertaan dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Kenyataan seperti itu memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan, dan hal itu merupakan syarat mutlak sehingga prasarana dan sarana yang ada dapat lebih bertahan lama, disamping itu keberadaan pembangunan di tengah-tengah masyarakat pada gilirannya nanti dapat dinikmati pula dan dirasakan oleh generasi-generasi yang akan datang.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan keikutsertaan masyarakat berpartisipasi dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah ada tersebut adalah pengaruhnya sangat positif dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada, seperti misalnya jalan-jalan desa yang terpelihara dengan baik, maka masyarakat lebih mudah memasarkan hasil-hasil usahanya di daerah-daerah lain terutama ke pasar ibu kota Kabupaten Barru atau bahkan dengan mudah ke kota Makassar ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan.

Jadi jelaslah bahwa pengaruh partisipasi masyarakat, baik partisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan yang efektif, maupun partisipasi masyarakat dalam upaya melestarikan atau memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah ada tersebut sangatlah positif.

C. Faktor-Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Peranan BPD Sebagai Wadah Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

Dalam kaitannya dengan peranan BPD terutama dalam peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan, khususnya di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, yaitu dimana dalam prakteknya di samping terdapat faktor pendukung juga sesuatu hal yang tidak bisa dipungkiri dalam kenyataannya bahwa terdapat pula faktor penghambat.

1. Faktor Pendukung

Peningkatan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dewasa ini, baik kemajuan pembangunan desanya itu sendiri maupun kemajuan pembangunan masyarakatnya. Namun peningkatan dan keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari berperannya organisasi BPD sebagaimana mestinya, utamanya berfungsinya dalam mewadahi partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna memperlancar pelaksanaan pembangunan juga tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung lainnya.

Dari data yang diperoleh peneliti, baik dari data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden maupun data-data yang diperoleh melalui kuesioner, bahwa faktor-faktor pendukung peranan BPD terutama berfungsinya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan adalah :

a. Adanya Koordinasi Antara Pengurus BPD Dengan Aparat Desa

Berperannya BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja adalah tidak terlepas dari adanya koordinasi yang baik antara pengurus BPD itu sendiri dengan aparat desa masing-masing.

Pada dasarnya usaha koordinasi tersebut dilakukan menurut Camat Tanete Riaja Drs. Iskandar dari hasil wawancara peneliti adalah untuk menghasilkan suatu hubungan atau komunikasi yang sedapat mungkin dapat mengarahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya melalui musyawarah, sehingga hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan pribadi yang kurang menguntungkan bagi kepentingan kemajuan dapat dicegah.

Untuk mengetahui tanggapan responden berkenaan dengan koordinasi antara pengurus BPD dengan aparat desa dan aparat kecamatan disajikan pada tabel 20.

Tabel 20
Tanggapan Responden Tentang Koordinasi Antara
Pengurus BPD dengan Aparat Desa/Kecamatan

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Sangat Baik	21	46,67	
2	Cukup Baik	24	53,33	
3	Kurang Baik	0	0	
4	Tidak Baik	0	0	
Jumlah		45	100	

Sumber: Diolah dari angket nomor 8

Melihat tabel 20, maka dapat dikemukakan bahwa koordinasi antara pengurus BPD dengan aparat desa adalah baik, hal ini terbukti dari hasil kuesioner dimana yang memberikan tanggapan “cukup baik” ada 24 orang atau 53,33 persen responden, dan 21 orang atau 46,67 persen responden yang menyatakan “sangat baik” koordinasi BPD dengan aparat desa. Kemudian yang menanggapi “kurang baik” dan “tidak baik” sama sekali tidak ada.

b. Pengelolaan Administrasi BPD Yang Baik

Berhasilnya suatu desa dalam menyukseskan program-program pembangunan maupun dalam meningkatkan kemajuan masyarakatnya, tidak hanya dinilai dari satu sisi saja misalnya pembangunan fisiknya semata, akan tetapi berhasilnya program pembangunan desa tak terkecuali di Kecamatan Tanete Riaja adalah salah satunya disebabkan oleh pengelolaan administrasi yang baik.

Dengan adanya pengelolaan administrasi BPD yang baik dan terpadu tersebut di Kecamatan Tanete Riaja adalah merupakan rangsangan dan dorongan serta motivasi bagi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan, baik pada saat perencanaannya maupun pada saat pelaksanaannya.

Untuk melihat secara deskriptif pengelolaan administrasi BPD tersebut, maka disajikan pada tabel 21.

Tabel 21
Tanggapan Responden Tentang Pengelolaan
Administrasi BPD

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Sangat Baik	16	35,56	
2	Cukup Baik	23	51,11	
3	Kurang Baik	6	13,33	
4	Tidak Baik	0	0	
	J u m l a h	45	100	

Sumber; Diolah dari angket nomor 9

Jadi jelaslah bahwa pengelolaan administrasi BPD di Kecamatan Tanete Riaja adalah baik, khususnya dalam rangka pengelolaan administrasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dilihat tanggapan responden yaitu 23 orang atau 51,11 persen responden yang menyatakan “cukup baik” dan 16 orang atau 35,56 persen responden yang menyatakan “sangat baik” pengelolaan administrasi BPD. Kemudian 6 orang atau 13,33 persen yang menyatakan “kurang baik”, dan tidak ada yang menyatakan “tidak baik” pengelolaan administrasi BPD.

c. Besarnya Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Ikut Serta Berpartisipasi

Menjadi hal yang cukup penting dari kesadaran dalam ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kecamatan Tanete Riaja. Kesemuanya ini tercapai adalah tidak terlepas dari upaya-upaya maksimal dari aparat pemerintah desa, khususnya oleh seluruh pengelola BPD dalam wilayah Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dalam mendorong semangat partisipasi masyarakat.

Menurut beberapa tokoh masyarakat yang sempat diwawancarai oleh peneliti yang kesemuanya mengatakan bahwa tingginya kesadaran masyarakat pada umumnya di Kecamatan Tanete Riaja dalam ikut serta berpartisipasi, khususnya dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan adalah hal yang cukup wajar, sebab dalam kenyataannya yang terjadi dimana pengurus BPD dalam membuat suatu program

pembangunan dilakukan dengan upaya musyawarah dengan melibatkan langsung masyarakat dalam hal penentuan program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dipaparkan tanggapan responden tentang tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanete Riaja dalam ikut serta berpartisipasi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan yang disajikan pada tabel 22.

Tabel 22
Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat Berpartisipasi Dalam Pembangunan

No.	Jawaban Responden	F	Persen	Ket.
1	Sangat Berpengaruh	17	37,78	
2	Cukup Berpengaruh	21	46,67	
3	Kurang Berpengaruh	7	15,55	
4	Tidak Berpengaruh	0	0	
J u m l a h		45	100	

Sumber: Diolah dari angket nomor 10

Berdasarkan tabel 22 di atas, maka jelaslah bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Tanete Riaja dalam rangka ikut berpartisipasi dalam pembangunan adalah cenderung tinggi yaitu 21 orang atau 46,67 persen responden yang menyatakan “cukup berpartisipasi”, dan 17 orang atau 37,78 persen responden yang menyatakan “sangat berpartisipasi” masyarakat dalam pembangunan. Kemudian 7 orang atau 15,55 persen responden yang menyatakan masyarakat “kurang berpartisipasi” dalam pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dipaparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja adalah pada dasarnya sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam hal menyumbang ide, gagasan, dan proses pengambilan keputusan.
2. Pengaruh partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru adalah sangat menunjang dan positif.
3. Faktor pendukung dan penghambat dalam memerankan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru adalah untuk faktor pendukungnya yaitu antara lain adanya koordinasi yang baik antara pengurus BPD dengan aparat desa dan kecamatan, pengelola administrasi BPD yang baik, dan besarnya tingkat kesadaran

masyarakat dalam ikut serta berpartisipasi, sedangkan faktor penghambatnya adalah keengganan warga masyarakat untuk ikut rapat dan pertemuan-pertemuan BPD.

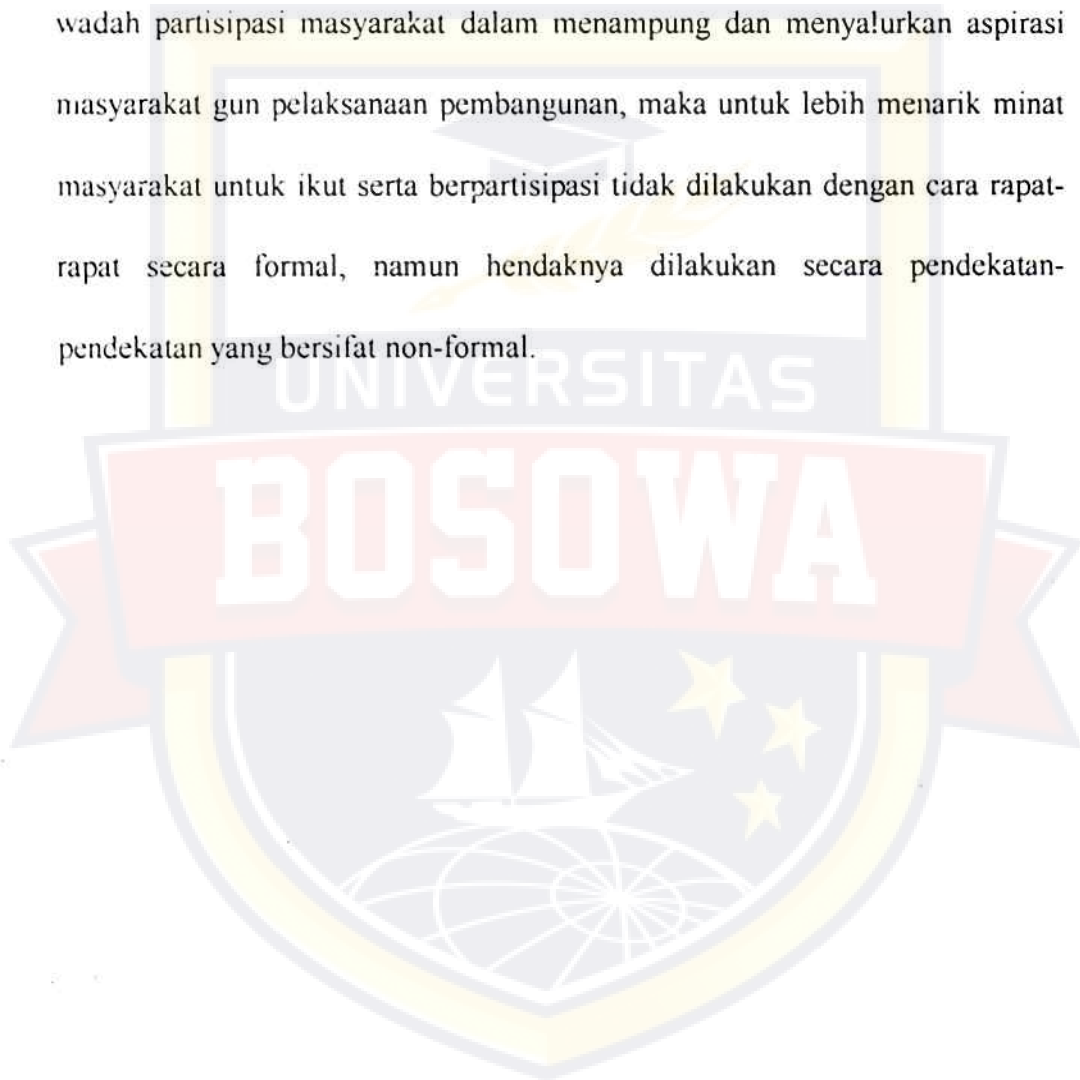
B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dapatlah dikemukakan saran-saran yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan di masa-masa yang akan datang dalam usaha meningkatkan peranan BPD khususnya sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan terutama dalam prakteknya di Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru sebagai berikut :

1. Agar peranan BPD sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan dapat lebih berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka hendaknya pihak pengambil kebijakan berusaha melakukan alternatif-alternatif lain misalnya melalui pendekatan-pendekatan persuasive kepada tokoh-tokoh masyarakat yang dianggap memiliki pengaruh besar.
2. Agar partisipasi masyarakat dapat lebih berbobot dan berpengaruh lebih positif lagi di masa-masa yang akan datang, maka seyogyanya masyarakat

lebih diarahkan lagi kepada hal-hal yang lebih berorientasi kepada pembangunan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

3. Mengingat adanya faktor penghambat dalam rangka BPD berperan sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna pelaksanaan pembangunan, maka untuk lebih menarik minat masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi tidak dilakukan dengan cara rapat-rapat secara formal, namun hendaknya dilakukan secara pendekatan-pendekatan yang bersifat non-formal.



DAFTAR PUSTAKA

- Bertha. I Nyoman; 1992; Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bryant, Coralie dan White; 1989; Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang; LP3ES, Jakarta.
- Hyung Ro dan Reforma; 1985; Social Change and Administrative Reform Toward The Year 2000. Cestern Regional Organization for Public Administration (CROPA); Korea.
- Koentjaraningrat; 1997; Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan; PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kuswara, Agustoha; 1995; Manajemen Pembangunan Desa; PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mubyarto; 1983; Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan; Sinar Harapan, Jakarta.
- ; 1985; Strategi Pembangunan Pedesaan; P3PPK, UGM Yogyakarta.
- Ndraha, Talizudulu; 1987; Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas; Bina Aksara, Jakarta.
- Pamudji S.; 1993; Ekologi Administrasi Negara; Bumi Aksara, Jakarta
- Prayitno. Hadi dan Lincoln Arsyad; 1987; Petani Desa dan Kemiskinan; BPFE, Yogyakarta.
- Ryaas Rasyid; 2000; Pengaturan Desa dan Kelurahan Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah; Kuraiko Pratama, Bandung.
- Siagian SP. 1983; Administrasi Pembangunan; PT. Gunung Agung, Jakarta.

- ; 1992; Organisasi, Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi; CV. Haji Masagung, Jakarta.
- ; 1994; Filsafat Administrasi; CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Singarimbun. M dan Effendi. S. (Editor); 1989; Metode Penelitian Survei; LP3ES, Jakarta.
- Soeprano. R; 1987; Mengenal Desa dan Pengelolaannya; Intermedia, Jakarta.
- Sugiono; 1994; Metode Penelitian Administrasi; Alfabeta, Bandung.
- Surjadi, A. 1989; Pembangunan Masyarakat Desa; Mandar Maju, Bandung.
- Suwigno; 1985; Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-Sumber Pendapatan Desa; Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Widjaja, A.W; 1993; Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.